

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM DI DESA WUNSE JAYA KECAMATAN WAWONII TENGGARA
KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

RUSTAM

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Penelitian Kualitatif ini bertujuan Untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam di Desa Wunse Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, Untuk mengetahui Apasaja Faktor-Faktor Penyebab Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Wunse Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan sebelum dan sesudah adanya Badan Usaha Milik Desa Wunse Jaya.

Data dikumpulkan melalui Observasi, interview dan dokumentasi BUMDes Wunse Jaya. Lalu data dianalisis dengan mengacu kerangka Miles Huberman dengan cara reduksi data, display data, dan verifikasi data untuk mengambil suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini Program BUMDes Wunse Jaya permodalan Masyarakat (Simpan Pinjam), Tabung LPG, Bengkel (Service) dan Elekton. Program BUMDes yang paling menonjol yaitu simpan Pinjam dan LPG sedangkan yang lainnya masih tahap perkembangan. peran program BUMDes Wunse Jaya ini masih belum dikatakan maksimal sehingga kesejahteraan di Desa Wunse Jaya belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur 5 indikator sebelum adanya BUMDes tingkat pendapatan yang rendah dibawa 600,000, pengeluaran kebutuhan yang masih tergolong susah didapatkan yaitu kebutuhan dasar, sembako, LPG dan lain-lain. Tingkat pendidikan yang masih rendah, kesehatan yang tidak terkoordinir, dan jenis rumah hunian yang masih tergolong kumuh. Setelah adanya BUMDes tingkat pendapatan tergolong tinggi 1,300,000-2,000,000/bulan, pengeluaran kebutuhan mudah didapatkan, tingkat pendidikan meningkat, kesehatan dapat diperhatikan dalam setiap bulannya untuk menurunkan stanting, dan rumah hunian rata-rata permanen. Peran Program BUMDes untuk meningkatkan Ekonomi dalam prespektif ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan materi saja tetapi juga non materi. Dana pinjaman dan Penyediaan LPG maupun jasa pelayanan yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wunse Jaya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, dan tentunya sesuai dengan tujuan maupun prinsip ekonomi islam itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat. maka dari itu agama memperbolehkan hal tersebut. Dan tidak hanya itu, masyarakat Desa Wunse Jaya sudah dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan Islam karena telah dapat memenuhi kebutuhan al-dharuriyyah, al-hajjiyyah, dan al-tahsinniyyah.

Kata Kunci: Peran BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi sejak lama dilakukan melalui program pembangunan desa, pemberdayaan desa melalui Dana Desa. Salah satu yang mendorong ekonomi Desa mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Sri, Anggraeni, M.R.R, 2016). Pengelolaan BUMDES jika optimal dilakukan Desa akan menjadi Desa yang makmur secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan sebagai salah satu mitra Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana pembangunan dan perekonomian dengan tuntutan mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan (Dewi, Kusuma, Sri, 2014).

BUMDES adalah badan usaha milik desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Lembaga ini digadang-gadang sebagai kekuatan yang akan bisa mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktifitas ekonomi bagi desa dengan berdasar pada ragam potensi yang dimiliki desa Bumdes harus lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui musyawarah Desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDES mulai dari nama lembaga, pemilihan pengurus, hingga jenis usaha yang bakal dijalankan (Majlis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 1945).

Menurut Satika Rani dalam penelitiannya di lapangan menunjukkan bahwa BUMDES Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari sudah cukup berperan dan berkontribusi bagi masyarakat hanya

saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Karya Mulya Sari. Hal itu dikarenakan masih banyaknya kendala yaitu seperti kurangnya modal, pengetahuan masyarakat dan kurang maksimalnya kinerja serta manajemen BUMDES Karya Abadi itu sendiri. Sedangkan dalam pandangan islam, masyarakat Desa Karya Mulya sari dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi kebutuhan al-dharuriyyah (primer), al-hajjiyyah (sekunder) dan al-thsaniyyah (pelengkap). Maupun relevan juga dengan penelitian Aditya Risaldi (2019) menunjukkan bahwa (1) Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Kaluku Kabupaten Luwu Utara dalam meningkatkan kehidupan ekonomi antara lain melalui pemberian dana pinjaman, memberikan seminar, pelatihan, dan konsultasi dalam mengelola usaha (2) Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena bersifat tolong menolong sehingga dianjurkan dalam islam tetapi dalam pelaksanaan BUMDES bertentangan dengan ekonomi islam karena menggunakan sistem bunga sehingga dilarang dalam Islam.

Selain penelitian terdahulu di atas peneliti melihat fenomena lain yang menunjukkan pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum maksimal di sebabkan penyertaan Dana BUMDes yang kurang sehingga program kerja yang dilaksanakan sangat terbatas. Program kerja simpan pinjam menggunakan sistem bunga yang tinggi. Fonomena lain yang terdapat program bidang perdagangan (Tabung LPG), bidang simpan pinjam. Saat ini pengelolaan usaha BUMDes Harapan baru masih memiliki hambatan pada

sumber daya manusia yang tidak bekerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Wawancara Muhammad (2021) menyatakan BUMDes Harapan Baru hanya fokus penjualan Tabung LPG memiliki dua pangkalan LPG dan Simpan Pinjam, simpan pinjam saat ini tidak efektif dijalankan sesuai yang diharapkan yaitu penyebabnya Nasabah tidak mengembalikan tepat waktu dan bahkan masih banyak Nasabah pinjaman tahun lalu belum dikembalikan. Hal ini merupakan masalah yang harus diselesaikan agar BUMDes Harapan Baru bias jalan sesuai harapan. Sehingga berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, BUMDes Harapan Baru belum menyumbangkan PAD Desa yang dapat membantu ekonomi masyarakat. Saat ini BUMDes Harapan Baru belum menyumbangkan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat.

Selain permasalahan di atas terdapat dipengurus BUMDes yang belum memiliki jiwa pengembangan Usaha dan loyalitas kepada Ketua BUMDes yang rendah. Secara umum BUMDes Harapan Baru berjalan program kerjanya, disini memiliki kesulitan dalam mengelola BUMDes yaitu SDM yang loyalitasnya rendah, penyertaan modal BUMDes yang rendah, dan SDM yang tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai pengurus BUMDes. Berdasarkan fakta lapangan di atas maka perlu adanya peninjauan pelaksanaan BUMDes agar berjalan dengan baik. Maka peneliti mengangkat Judul Penelitian “Peran Badan Usaha Milik Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam Di Desa Wunse Jaya Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan”.

2. Landasan Teori

Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Amius Sodiq, 2015). Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut para pakar dan ahli yang terdapat dalam buku P3EI, indikator kesejahteraan Islami adalah (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017): yaitu “terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeqi yang diterima, keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qana’ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta merasa bahagia”. Dengan demikian, kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual. Sedangkan kebutuhan menurut Islam adalah kebutuhan yang didasarkan oleh tiga kebutuhan dasar, seperti yang diungkapkan ilmuan Islam Al-Syathibi (Muslimin Kara, 2012) yaitu:

- a. Al-Dharuiyah (Kebutuhan Primer)
- b. Al-Hajiyah (Kebutuhan Sekunder)
- c. Al-Tahsinniyah (Kebutuhan Tersier)

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif Deskriptif. Adapun pemilihan dan penetapan

sumber data di samping didasarkan pada aspek representatif juga keterpaduan data hingga terjadi kejenuhan informasi. Sumber informasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Wunse Jaya
2. Pengurus BUMDes
3. BPD Desa Wunse Jaya
4. Tokoh Masyarakat
5. Masyarakat

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, penulis langsung terjun di lapangan (field research), agar mendapatkan informasi dan sejumlah data yang dibutuhkan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian ini menggunakan teknik:

1. Observasi (pengamatan).
2. Interview (wawancara).
3. Dokumentasi

Agar mendapatkan data yang valid dan cocok untuk disajikan berkaitan dengan Impelentasi BUMDes berbasis ekonomi Islam, peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan pola sebagai berikut Sugiyono (2019) :

1. Reduksi data
2. Pengorganisasian data
3. Kategori data
4. Pengolahan data

4. Pembahasan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Hal tersebut berarti pembentukan BUMDes di dasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan dan pembentukan BUMDes adalah atas prakarsa masyarakat desa. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan salah satu lembaga perekonomian yang sebagian modalnya dimiliki oleh Desa yang dipisahkan melalui penyertaan langsung yang berasal dari dana transfer Desa guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan. Berdasarkan teori yang telah tulis dalam kerangka teori jenis usaha BUMDes:

1. BUMDES Trading

BUMDES Trading merupakan BUMDES yang menjalankan usaha dengan berdagang kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian. Unit usaha ini mulai tumbuh di banyak desa. Ini adalah bisnis sederhana, berskala lokal dan berlingkup internal desa. BUMDES Desa Wunse Jaya sudah terdapat jenis usaha ini yaitu adanya penyediaan kebutuhan LPG. Pemasukkan BUMDES dari unit usaha Trading atau penjualan LPG ini masih belum terlalu berpengaruh bagi pendapatan BUMDes karena hasil penjualan dari LPG ini masih digunakan untuk menambah kelengkapan barang-barang yang ada di BUMDES. Jadi pemasukkan BUMDES dari unit usaha ini dikatakan masih belum berpengaruh bagi pendapatan/kas BUMDes.

2. BUMDES Serving

BUMDES Serving mulai tumbuh secara inkremental di banyak desa. Keterbatasan air bersih dan ketidakmampuan sebagian besar warga

mengakses air bersih, mendorong banyak desa mengelola dan melayani air bersih dengan wadah BUMDES atau PAMDes. Karena itu pengelolaan air bersih oleh BUMDes merupakan cara baru, sebuah bentuk perubahan pengelolaan dari masyarakat yang anonim kepada desa. Kehadiran BUMDes itu melahirkan otoritas dan tata kelola air bersih yang di gerakkan oleh desa. Di Desa Wunse Jaya jenis usaha BUMDes model Serving ini belum diterapkan, dan belum masuk kedalam program atau jenis usaha yang direncanakan, karena dari hasil wawancara peneliti dengan pengurus BUMDes

3. BUMDes Brokering

BUMDES Brokering merupakan BUMDes yang menjadi lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar agar para BUMDes. BUMDes yang menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat. Contohnya seperti jasa pembayaran listrik, PAM, Telp dan lain sebagainya. Jenis Usaha ini BUMDes Wunse Jaya belum diterapkan.

4. BUMDES Renting

BUMDES Renting adalah BUMDES yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa. Ini sudah lama berjalan di banyak desa, terutama desa-desa yang ada di pulau Jawa. Contoh jenis usaha renting yaitu: penyewaan traktor, pekasas pesta, gedung pertemuan, rumah, toko, tanah maupun penyewaan mesin mollen. Dalam BUMDES Wunse Jaya sudah terdapat unit usaha Renting, dan BUMDES ini menjalankan bisnis penyewaan dalam bentuk penyewaan mesin Elekton. Banyak warga desa maupun desa tetangga melakukan

penyewaan Elekton di BUMDes Wunse Jaya.

5. BUMDES Banking

BUMDes Banking adalah BUMDes yang menjalankan bisnis uang, yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa daripada rentenir desa atau bank-bank konvensional. Contoh jenis usaha Banking yaitu: bank desa atau lembaga pengkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa, unit usaha dana bergulir maupun peminjaman modal. Didalam BUMDes Wunse Jaya telah ada unit usaha Banking, yaitu dalam hal peminjaman modal kepada masyarakat. Ini dimaksudkan agar masyarakat lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. BUMDes Wunse Jaya telah menerapkan BUMDes Banking yaitu dengan memberikan permodalan kepada masyarakat dengan secara bergulir. Unit peminjaman modal ini dapat dikatakan berkontribusi besar bagi pendapatan masyarakat

Modal di BUMDes yaitu harus memiliki usaha dan juga adanya jaminan yaitu seperti surat tanah ataupun BPKB motor yang di serahkan ke BUMDES selama melakukan peminjaman. Setiap peminjaman yang dilakukan dikenakan 2% untuk BUMDES dengan waktu maksimal tempo selama 6 bulan, pengenaan 2% tersebut diberikan oleh peminjam pada saat awal melakukan peminjaman, sehingga pada saat waktu pengembalian modal yang dipinjamkan utuh. Tidak hanya itu juga bahwa modal yang dipinjamkan juga maksimal hanya Rp.15.000.000. dengan demikian apabila dimanfaatkan akan sangat berperan bagi perkembangan ekonomi masyarakat.

Dari hasil penjelasan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, unit usaha yang ada di BUMDes Karya Wunse Jaya ini sudah cukup lengkap yakni sudah ada BUMDes Banking, Renting maupun Trading. Namun didalam BUMDes Wunse Jaya belum ada BUMDES Brokering dan Serving dari unit-unit usaha yang ada pada BUMDES ini unit usaha Banking yang menyumbang pemasukkan paling besar untuk BUMDes lalu unit usaha Ranting yang dianggap telah berjalan dengan baik dan banyak peminatnya, sedangkan unit usaha lainnya masih mengalami perkembangan.

Hasil penelitian Meigawati (2018) menjelaskan bahwa Peran program BUMDes belum berjalan dengan baik. Faktor pengham-batnya yaitu dari kurangnya sumberdaya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi Program BUMDes kepada masyarakat. Adapun faktor pendukungnya yaitu Adanya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program BUMDes melalui kegiatan simpan pinjam.

Pernyataan ini diperkuat dari hasil penelitian Ibrahim dan Sutarna (2018) menjelaskana bahwa BUMDES pada perdesaan kawasan pertambangan emas belum berhasil secara total dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dari unit-unit program BUMDES yang ada. BUMDES Kawasan pertambangan emas memiliki kelebihan yaitu: a) mudahnya akses keuangan dan b) peningkatan ekonomi rumah tangga. Kelemahan: a) Sumberdaya Manusia pengelola dan b) rencana usaha rendah. Perlu adanya partitipasi aktif dari masyarakat dalam menjalan program BUMDes menuju ekonomi berkemajuan.

Selain faktor penyertaan modal secara umum keberadaan BUMDes dapat mengurangi kelemahan dalm mensejahterakan anggota BUMDes

sebab BUMDes Desa Wunse Jaya memfokuskan penyertaan modal kepada masyarakat sedangkan untuk pengurus mendaatkan penghasilan dari hasil pengelolaan BUMDes. Pelaksanaan program BUMDes menitikberatkan asas manfaat kepada masyarakat. BUMDes Desa Wunse Jaya akan membantu masyarakat yang telah jalan Usahanya meskipun kecil sehingga masyarakat tersebut dapat mengembangkan usahanya.

Keberadaan BUMDes dalam meaksanakan program dan usaha tidak bias lepas dari anggaran yang dimiliki. Sebagai lembaga usaha keberadaan modal usaha salah satu nadi untuk hidup dan berkembang. Kesiapan dana usaha terbatas memiliki tingkat kemampuan pengelola usahapun akan mengalami kemunduran.

BUMDes dalam mengelola program usaha di tengah masyarakat masih mengalami kendala terutama terbatasnya anggara yang dimiliki. Menurut Ihsan (2018) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes melalui unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes dan kelompok-kelompok masyarakat yang bermitra dengan BUMDes. Namun masih terdapat hambatan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes. Permasalahan yang terjadi adalah adanya potensi desa yang belum bisa dikembangkan melalui BUMDes karena belum adanya modal.

5. Kesimpulan

1. Program BUMDes Wunse Jaya permodalan Masyarakat (Simpan Pinjam), Tabung LPG, Bengkel (Service) dan Elekton. Program BUMDes yang paling menonjol yaitu simpan Pinjam dan LPG sedangkan yang lainnya masih tahap perkembangan. peran

program BUMDes Wunse Jaya ini masih belum dikatakan maksimal sehingga kesejahteraan di Desa Wunse Jaya ini belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat Wunse Jaya

2. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur 5 indikator sebelum adanya BUMDes tingkat pendapatan yang rendah dibawa 600,000, pengeluaran kebutuhan yang masih tergolong susah didapatkan yaitu kebutuhan dasar, sembako, LPG dan lainlain. Tingkat pendidikan yang masih rendah, kesehatan yang terkoordinir, dan jenis rumah hunian yang masih tergolong kumuh. Setelah adanya BUMDes tingkat pendapatan tergolong tinggi 1,300,000-2,000,000/bulan, pengeluaran kebutuhan mudah didapatkan, tingkat pendidikan meningkat, kesehatan dapat diperhatikan dalam setiap bulannya untuk menurunkan stanting, dan rumah hunian rata-rata permanen
3. Peran Program BUMDes untuk meningkatkan Ekonomi dalam prespektif ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan materi saja tetapi juga non materi. Dana pinjaman dan Penyediaan LPG maupun jasa pelayanan yang diberikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wunse Jaya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Hal ini merupakan sifat saling tolong menolong sesama muslim, dan tentunya sesuai dengan tujuan maupun prinsip ekonomi islam itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan umat. maka dari itu agama memperbolehkan hal tersebut. Dan tidak hanya itu,

masyarakat Desa Wunse Jaya sudah dapat dikatakan sejahtera dalam pandangan Islam karena telah dapat memenuhi kebutuhan al-dharuriyyah, al-hajjiyah, dan al-tahsinniyyah.

Daftar Pustaka

- Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development Volume V No. 1* Februari 2014
- Amius Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 2, Desember. 2015
- Dewi, Kusuma, Sri, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa (Pades) Serta Membutuhkan Perekonomian Desa, *jurnal Of And Development*, Volume 5 No. 1, 2014
- Hasyemi Rafsanjani, dkk, Kemitraan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dengan kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa (studi pada Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, Hal. 67-72.
- Muslimin Kara, Pemikiran Al-Syathibi tentang Masalah dan Peran dalam Ekonomi Syariah, *E-journal Assets* Vol 2 No 2 Tahun 2012
- Maria Rosa Ratnasari. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta Dalam

Jurnal Modus Volume 28 No 2
Tahun 2016

Nanang Fatah. Peranan Bumdes dalam
Perekonomian Masyarakat dalam
jurnal Ekonomi Vol 2 No 1 tahun
2016

Ratna Aziz Prasetyo. Peranan Bumdes
Dalam Pembangunan Dan
Pemberdayaan Masyarakat Di
Desa Pejambon Kecamatan
Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro
Dalam Jurnal Dialektika Volume
XI No 1 Tahun 2016

Sri, Anggraeni. M.R.R, Peran Badan
Usaha Milik Desa (BUMDES)
Pada Kesejahteraan Masyarakat
Pedesaan Studi Pada Bumdes di
Gunung Kidul, Vol.28 .No. 2.
2016.

Sri Nawatmi, Etika Bisnis Dalam
Perspektif Islam, Jurnal Fokus
Ekonomi, Vol 9 No 1 Tahun 2019

Ziauddin Sardar, Kesejahteraan Dalam
Perspektif Islam, Sardar, et
al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori
dan Terapan Vol. 3 No. 5 Mei
2016: 391-401

Widjajanti Isdijoso, Dkk, 2016.
Penetapan Kriteria dan Variabel
Pendataan Penduduk Miskin yang
Komprehensif dalam Rangka
Perlindungan Penduduk Miskin di
Kabupaten/Kota, Lembar Kertas
Semeru. The SMERU Research
Institute

